

**Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat , Terhadap
Pembangunan Desa**

(Studi Kasus Pada Desa Tanjung Genteng Kab Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu

Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

ARI WIBOWO
NIM 4012017005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1442 H/2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA TANJUNG GENTENG KAB ACEH TAMIANG)” an. ARI WIBOWO, NIM 4012017005, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LANGSA pada tanggal 16 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 16 Desember 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa.

Penguji I / Ketua

Dr. Safwan Kamal, M.E.I

NIDN. 2018059002

Penguji II / Sekretaris

Zikriatul Ulva S.E., M. Si

NIP. 2024029102

Penguji III / Anggota

Dr. Iskandar Budiman, M.CL.

NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji IV / Anggota

Chahayu Astina, S.E., M.Si

NIP. 198411232019032007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.

NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT, TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA TANJUNG GENTENG
KAB ACEH TAMIANG)**

Oleh :

Ari Wibowo

Nim: 4012017005

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 4 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002

Pembimbing II



Zikriatul Ulya S.E., M. Si
NIP. 2024029102

Mengetahui

A.n Ketua Prodi
Sekretaris Perbankan Syariah



Fakhrizal, Lc., MA
NIP. 198502182018011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Wibowo
Nim : 4012017005
Tempat/tgl. Lahir : Tj. Genteng, 10 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Alur Selamat, Desa Tanjung Gneteng,
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 4 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Ari Wibowo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesuksesan memang sebuah tujuan. Tapi bisa bermanfaat untuk sekitar adalah impian terbesar. Itulah kunci sukses dan definisi bahagia yang sesungguhnya”

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah Dan Ibu tercinta (Ayah Warsono Dan Ibu Susila Karyawati) yang selalu memberikan motivasi dan do'a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.

Dan saya persembakan juga skripsi ini untuk Alm ibunda saya (Alm Misiah) Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik duka maupun suka.

Terima kasih

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transparency, accountability and village development (Case Study of Tanjung Genteng Village, Aceh Tamiang Regency). This research was conducted with the aim of knowing the effect of Transparency, accountability and village development (Case Study of Tanjung Genteng Village, Aceh Tamiang Regency). By using quantitative methods with a sample of 38 respondents. The sampling method in this study uses the purposive sampling method, the data analysis model uses multiple linear regression. Based on the results of the t-test (partial test) the results of the tcount are 5.088 and the calculated significant value is $0.000 < 0.05$, meaning that the transparency variable has a positive and significant effect on village development, the accountability variable has a tcount value of 2.298 and the calculated significant value is $0.024 < 0.05$ means that the variable has a positive and significant effect on village development and the community participation variable gets a tcount value of 4.391 and a significant value calculated $0.000 < 0.05$ means a positive and significant effect on village development, the results of the simultaneous test are transparency, accountability and community participation obtained a fcount value of 22.905 and a significant value calculated $0.000 < 0.05$ so that the variables of transparency, accountability and community.

Keywords: Transparency, Accountability and Community Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pembangunan desa (studi kasus Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pembangunan desa (studi kasus Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang). Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 38 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, model analisis data ini menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan dari hasil uji t (uji secara parsial) didapatkan hasil t_{hitung} sebesar 5.088 dan nilai signifikan yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa, variabel Akuntabilitas memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.298 dan nilai signifikan yang dihitung $0,024 < 0,05$ berarti variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa dan variabel partisipasi masyarakat memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.391 dan nilai signifikan yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa, hasil uji simultan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memperoleh nilai f_{hitung} sebesar 22.905 dan nilai signifikan yang dihitung $0,000 < 0,05$ sehingga variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transapransi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang)”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Untuk kedua orang tua saya Ayahanda Warsono dan Ibunda Susila Karyawati yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a dan memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada abangda saya tersayang Ewin Cacis Yang Selalu support adiknya dalam segala hal apapun itu.
4. Terima kasih juga kepada adik-adik saya dilla, pian, safana, dedek yang selalu menghibur abangda nya dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Bapak Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

7. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M.SI selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
8. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I sebagai pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Zikriatul Ulya, S.E, M. Si sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Para Dosen IAIN Langsa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada teman online saya yang telah membantu dan menemani saya dalam pembuatan skripsi.
12. Terima kasih kepada sahabat saya Sinta, Musda, Kak Dwi, yang selalu support dan sangat banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada seluruh teman PBS angkatan 2017 Unit 5 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu untuk waktu kebersamaan kita selama menempuh studi di IAIN Langsa dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa 04 Oktober 2021

Ari Wibowo
Nim. 4012017005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— — —	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
— و	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
— ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
— و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Identifikasi Masalah	10
1.6 Batasan Masalah	10
1.7 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik	12
2.1.1 Dana Desa	12
2.2 Pembangunan Desa	14
2.2.1 Pengertian Pembangunan Desa	14
2.2.2 Indikator Pembangunan Desa	16
2.3 Transapransi	17
2.3.1 Pengertian Transapransi	17
2.3.2 Indikator Transapransi	19
2.3.3Prinsip-prinsip Transapransi.....	19
2.4 Akuntabilitas	21
2.4.1 Pengertian Akuntabilitas	21
2.4.2 Indikator Akuntabilitas	24
2.4.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas	25
2.5 Partisipasi Masyarakat	26
2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	26
2.5.2 Indikator Partisipasi Masyarakat	27
2.6 Penelitian Terdahulu	28
2.7 Kerangka Teoritis	32
2.8 Hipotesis Penelitian	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Populasi dan Sampel	35
3.3.1 Populasi	35
3.3.2 Sampel	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	38
3.6 Identifikasi dan Operasional Variabel	38
3.6.1 Identifikasi Variabel	38
3.6.2 Defenisi Operasional Variabel.....	39
3.7 Uji Validitas dan Reabilitas	41
3.7.1 Uji Validitas.....	41
3.7.2 Uji Reabilitas	42
3.8 Metode Analisis Data.....	43
3.9 Model Analisis Linier Berganda	43
3.10 Uji Asususi Klasik	44
3.10.1 Uji Normalitas	44
3.10.2 Uji Linieritas	44
3.10.3 Uji Multikolinearitas	45
3.10.4 Uji Heteroskedastisitas.....	45
3.10.5 Uji Autokorelasi	46
3.11 Uji Parsial (Uji T) dan Uji Simultan (Uji F)	46
3.11.1 Uji Parsial (Uji T).....	46
3.11.2 Uji Simultan (Uji F)	47
3.12 Uji Kofisien Determinan (R^2)	47

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umumn Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang	48
4.1.2 Visi dan Misi Tanjung Genteng	49
4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang	50
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh tamiang	51
4.1.5 Karakteristik Responden	55
4.1.6 Penjelasan Responden Berdasarkan Variabel	59
4.1.7 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas	64
4.1.8 Model Analisis data.....	67
4.1.9 Hasil Uji Asusi Klasik	68
4.1.10 Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.1.11 Hasil Uji T dan Uji F	76
4.1.12 Koefisien Determinasi	78
4.1.13 Hasil Hopotesis.....	80

4.2 Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Skala Likers.....	42
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa Tanjung Genteng	57
Tabel 4.2 Berdasarkan tingkat pendidikan.....	57
Tabel 4.3 Penjelasan responden berdasarkan variabel transparansi.....	58
Tabel 4.4 Penjelasan responden berdasarkan variabel akuntabilitas	59
Tabel 4.5 Penjelasan responden berdasarkan variabel partisipasi masyarakat	59
Tabel 4.6 Penjelasan responden berdasarkan variabel pembangunan desa	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov	62
Tabel 4.10 Hasil uji linieritas	
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.12 Hasil uji autokorelasi	
Tabel 4.13 Hasil uji regresi linier berganda	
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji T)	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Berganda	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 1.1 Kantor Datok Desa Tj.Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang.....	38
Gambar 2.1 Kerangka Teori	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tj.Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang.....	53
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	54
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Gambar 4.5 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan	56
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	56
Gambar 4.7 Histogram	54
Gambar 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	78
Lampiran 2 Jawaban Responden	86
Lampiran 3 Hasil Uji	97
Lampiran 4 Dokumentasi	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era formasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik. Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR dengan mengeluarkan ketetapan yaitu Tap MPR Nomor XV/NPR/1998 tentang “penyelenggaraan otonomi daerah; Pengaturan, pembaguan, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbang keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara kesatuan republik Indonesia” dan UUNo 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.¹ Namun seiring berjalannya waktu dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sudah sesuai dengan perkembangan negara, ketatanegaraan dan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, dikeluarkan undang-undang pengganti, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi yang luas diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini

¹ Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)

menunjukkan bahwa daerah otonomi memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki tanpa intervensi penelitian pusat. Sejak peraturan ini berlaku, terjadi pergeseran pola pembangunan di Indonesia yang mulanya tersentralisasikan menjadi desentralisasi.²

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Masih menjadi kendala hingga saat ini adalah keterbatasan keuangan desa berupa APBDes yang tidak berimbang antara penerima dan pengeluaran sehingga mengakibatkan defisit anggaran, ditambah dengan maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta buruknya pengelolaan. Dari APBDes anggaran pendapatan dan belanja desa yang terjadi di desa-desa di Indonesia, keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.³ Dengan adanya desentralisasi fisik daerah otonomi diuji untuk dapat menggunakan anggaran yang direncanakan sebelumnya dengan tepat guna, efektif, dan efisien dengan tetap mengedepankan asa kebebasan yang bertanggung jawab. Desentralisasi fisik diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yakni, meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam membangun dan mengembangkan daerahnya demi terciptanya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah tersebut yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta memperbaiki

² *Ibid . h. 24*

³ *Ibid h. 45*

alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kepada tingkat pemerintah yang diyakini mengetahui seluruh potensi yang dimiliki.⁴

Pemerintah desa mendapatkan suatu otonomi untuk menjalankan pemerintahan di desa memenuhi kebutuhan masyarakat desa, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa, menaatkan tradisi, budaya, adat istiadat, maupun kepercayaan dengan tetap mengedepankan kebebasan yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Di dalam peraturan ini disebutkan beberapa perangkat desa yang dapat dibentuk, serta pembahasan sekilas terkait dengan alokasi dana desa dan pembangunan desa. Peraturan ini memperkuat kedudukan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

ADD yang merupakan dana perimbangan pemerintahan daerah kepada pemerintahan desa adalah perwujudan dari adanya desentralisasi fisik yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan swadaya gotong royong dan kemajuan ekonomi. Nilai dari ADD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK), dimana ADD dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).⁵

Para pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes diuntut untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari aparat desa sangat dibutuhkan. Menurut Dwiyanto,

⁴ *Ibid* h.27

⁵ *Ibid* h.30

transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah akan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya pemberantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalah gunakan kekuasaan.⁶

Transparan adalah prinsip kerbukaan yang kemungkinan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi luas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya.⁷

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menjadikan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Akan tetapi perangkat Desa Tanjung Genteng tidak menjalankan transparan yang semestinya yang dimana tidak adanya baliho atau spanduk pemasukan dan pengeluaran anggaran dari pemerintah.

⁶ *Ibid h.34*

⁷ Muindro Renyowijoyo (d.3), akuntansi sektor publik : Organisasi non-laba (Jakarta: Mitra wacana media, 2013), h. 20-22



Gambar 1.1
Kantor datuk penghulu desa Tanjung Genteng.

Dalam tahap perencanaan pemerintahan desa, penyusunan rencana pembangunan desa dengan mengadakan musyawarah, musyawarah dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat sehingga keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Tahap perencanaan diwujudkan dengan penyusunan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun yang dilaksanakan oleh sekretaris desa. Tahap pelaksanaan ADD dilakukan oleh tim pelaksana desa sesuai dengan desain yang telah disusun pada tahap perencanaan, perlu adanya keterbukaan informasi dalam proses ini dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik ADD melalui papan informasi dipasang untuk setiap kegiatan pembangunan, kemudian pada tahap pertanggungjawaban penggunaan ADD dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini berfokus pada kantor datuk Desa Tanjung Genteng Kab,Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kantor datuk merupakan wilayah kerja datuk sebagai perangkat desa. Desa tanjung genteng, yang dipimpin oleh seorang datuk yang berkedudukan dibawah pertanggung jawaban camat kejuruan muda.

Masalah lainnya Bapak Anto mengatakan yang sering dihadapi seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa yaitu keterlambatan alokasi dana desa dari pusat yang sering terjadi di awal tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk membayar gaji perangkat desa, listrik, dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Program alokasi dana desa yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik akibat keterlambatan anggaran dan kurangnya transparansi alokasi dana desa terhadap masyarakat setempat.⁸

Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang kemungkinan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.⁹

Ada pun kelebihan di Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang. Seperti Ibu-ibu PKK selalu melakukan setiap bulannya posyandu dengan rutin, dan kemajuan Ibu-ibu PKK juga telah mengharumkan nama baik Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang dalam ajang lomba senam tingkat kecamatan pada tahun 2019 dalam rangka merayakan hari kemerdekaan RI. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi langsung ke Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang.¹⁰

Pada teorinya akuntabilitas adalah pertanggung jawaban terhadap pembangunan Desa maka pereangkat Desa harus bertanggung jawab atas

⁸ Hasil wawancara Bapak Anto (Sekertaris Desa Tanjung Genteng) pada tanggal 14 mei 2020

⁹ Hasil observasi langsung ke desa tanjung genteng pada tanggal 25 mei 2020

¹⁰ Hasil observasi langsung kedesa tanjung genteng pada tanggal 25 mei 2020

kemajuan desa dan bertanggung jawab terhadap apa yang di keluarkan oleh pemerintah dan di sampaikan kepada masyarakat keseluruhnya buykan hanya memberitahukan hanya kepada kelurga perangkat saja tetapi harus keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang.

Masyarakat Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang mengatakan, “menurut masyarakat setempat perangkat desa kurang teliti dalam melakukan pendataan masak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bantuan-bantuan seperti beras, telur dan sembako lainnya yang mendapatkan itu adalah orang yang dikatakan mampu yang mendapatkan nya sedangkan yang kurang mampu dan yang tidak mendapatkannya”.¹¹

Pada teorinya Transparansi adalah keterbukaan yang nyata, faktor ini sangat penting untuk perangkat desa dalam melakukan transaksi, pengeluaran anggaran dan pemasukan dari pemerintah kepada masyarakat Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang

Masyarakat Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang mengatakan,” menurut masyarakat Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang seharusnya perangkat Desa yang dimana harus tertera baliho atau spanduk yang tertempel di dinding Kantor Desa tersebut supaya masyarakat Desa tau berapa besar anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa.” Harapanya pihak perangkat Desa mampu berikan spanduk di

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Candra (Warga Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang) pada tanggal 26 Mei 2020

kantor datok tersebut agar masyarakat tau bereapa pemasukan dan pengeluaran anggaran tersebut.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas dengan itu saya mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang)”**

1.2 Perumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transparasi berpengaruh terhadap pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?
4. Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui transparasi berpengaruh terhadap pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Ita (masyarakat Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang) pada tanggal 23 mei 2020

3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?
4. Untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh Terhadap Pembangunan Desa Didesa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi peneliti mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa (studi kasus pada Desa Tanjung Genteng Kab.Aceh tamiang)
2. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi, ilmu dan masukan kepada masyarakat agar mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa (studi kasus pada Desa Tanjung Genteng Kab.Aceh tamiang)
3. Bagi perusahaan, memberi ilmu dan wawasan agar dapat melaksanakan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat menjadi lebih baik lagi di Desa Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang.

1.5 Identifikasi Masalah

1. Anggaran desa dari pemerintah sangat besar, namun nyatanya semua akses jalan penghubung antara desa satu dengan desa yang lain nya itu rusak. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi langsung ke desa tersebut

2. Seharusnya perangkat desa lebih mempublikasikan anggaran-anggaran yang telah di keluarkan dari pemerintahan, namun nyatanya perangkat desa menutupi anggaran tersebut kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi langsung kedesa tersebut.
3. Seharusnya perangkat menciptakan upaya perlindungan atau pemihakan Bagi masyarakat dengan menciptakan iklim ekonomi yang pro rakyat, perkembanganm sektor riil dan memberikan jaminan sosial kepada masyarat yang memerlukan, namun nyatanya yang mendapatkan jaminan sosial bukan dari keluarga yang kurang mampu atau yang membutuhkan melainkan orang yang dikatakan mampu yang mendapatkan jaminan sosisal tersebut.
4. Seharusnya masyarakat ikut serta dalam kemajuan desa namun nyatanya masyarakat desa tanjung genteng kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa. Hal ini dibuktikan denan hasil observasi langsung kedesa tersesbut

1.6 Batasan Masalah

Peneltian membatasi permasalahan dengan tujuan agar dalam pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang akan diteliti sangat terbatas yaitu camat, perangkat desa dan beberapa Masyarakat desa tanjung genteng kecamatan kejuruan muda,kabupaten aceh tamiang?

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembangunan desa. Sedangkan variable terikat nya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Supaya penyusun skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian atau masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoritis, berisi tinjauan pusataka, peneliti terdahulu, kerangka teoritis, hipotesa penelitian, serta membahas tentang variabel-variabel yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi ruang lingkup penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan, pada bab ini dijelaskan analisis hasil penelitian dari model yang telah disusun sebelumnya.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam pengujian dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya

BAB II

Landasan Teori

2.1 Kebijakan publik

2.1.1 Dana desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Dana Desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan msyarakat.¹³

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besarnya alokasi anggaran yang ditujukan langsung ke desa ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.¹⁴

Berdasarkan besarnya dana desa untuk setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. tata cara penyaluran dan penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.¹⁵

¹³ Undang-undang no 6 tahun 2015 tentang desa

¹⁴ *Ibid* h.5

¹⁵ Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, “petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa”, h.49

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendekatan kabupaten/kota dan anggaran belanja serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola dengan sangat tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan menghentikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.¹⁶

Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan menjadikan program berbasis desa lebih efektif dan merata. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah kepada desa, alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Desa dan pengelolaan dana desa dalam APBD Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengelolaan dana desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan desa.¹⁷

¹⁶Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 04 tentang desa, h. 2.

¹⁷Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber Dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, H.4-5

2.2 Pembangunan Desa

2.2.1 Pengertian pembangunan desa

Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju pembangunan dan kemajuan yang memerlukan masukan secara menyeluruh dan berkesinambungan serta merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.¹⁸

Pembangunan pedesaan adalah suatu konsep pembangunan berbasis pedesaan di pedesaan dengan memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintah secara berkelanjutan.
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal desa sesuai dengan kondisi geografis.
3. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan, pembentukan modal sosial budaya masyarakat pedesaan.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Pembangunan ekonomi pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

¹⁸ Abu Rahum. “ Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa” dalam (e-jurnal ilmu , pemerintahan, volume 3, nomor 4, 2015), h.8

7. Mengawasi pelaksanaan undang-undang desa secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan melalui koordinasi, fasilitas, pengawasan dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. sumber daya dilakukan dengan mengutamakan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan peraturan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran penanaman modal, kelestarian lingkungan, serta keserasian kepentingan daerah dan kepentingan umum.¹⁹

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigm islam diantaranya berasal dari ibn khaldun dan syah wali allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat nya dari pengakuan manusia pada keesaan allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-nya. Karena islam bersifat menyeluruh (khalifah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu agar pembangunan

¹⁹Rozali Abdullah, "pelaksanaan otonomi luas daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung", (Jakarta : PT Raja Grafindo,2007), h. 173

dapaata dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilakukan berdasarkan petunjuk dari tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

2.2.2 Indikator Pembangunan Desa

Menurut Intan sengaji dan Nur Fadrih asyik ada pun indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sarana perekonomian, kesuksesan pembangunan desa dapat dilihat dari adanya peningkatan taraf perekonomian pada masyarakat. Tentunya dengan memanfaatkan potensi tak terbatas dengan pembangunan sektor tersebut akan langsung berdampak pada perekonomian para pelaku usaha.
2. Tingkat pendidikan, tentu saja hal ini menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan masyarakat desa seperti juga ciri-ciri yayasan, kini desa telah tumbuh dengan kesadaran akan tingkat pendidikan yang tinggi. Meskipun hal ini bukan hal utama namun tentunya salah satu pintu dalam menghadapi era persaingan yang semakin ketat adalah dengan jalan melalui pendidikan.,
3. Tingkat kesehatan, dimana kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam hidup. Kesehatan selalu berherelasi dengan ketersediaan tenaga kesehatan terutama dipedesaan termasuk juga kedalam bentuk-bentuk yayasan, hal ini menunjukkan bahwa memang pembangunan desa telah mengalami keberhasilan.

Kebijakan untuk menempatkan 1 (satu) tenaga kesehatan pada setiap desa sangat member dampak positif.²⁰

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian transparansi

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan bahwasannya transparansi berarti keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya public. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan public, dan proyeksi-proyeksinya.²¹

Perjuangan bersama kita sebagai suatu bangsa untuk bekerja mencapai visi pembangunan kedepan menuju kemakmuran bersama berlangsung terus secara berkesinambungan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah bahwa sumber daya yang tersedia semakin terbat. Hal inilah yang mendasari pentingnya manajemen sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Realisasi tersebut membuat tuntutan keterbukaan lembaga pemerintahan maupun badan-badan usaha milik pemerintahan menjadi bagian penting pelaksanaan tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dari sumber publik.²²

²⁰ Intan sengaji dan Nur Fadrijh asyik. “ *Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa*” dalam (e-jurnal ilmu dan riset akuntansi , pemerintahan, volume 7, nomor 3, 2018), h.4

²¹ Moh. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan*(Bandung; Alfabeta, 2008),h. 39

²² Penny Kusumatuti Lukito, *membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor public* (Jakarta; grasindo, 2014), h. 110

Istilah tata pemerintah yang baik (*good public governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokrasi, dan efektif. Selain sebagai konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

“Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal”.²³

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjelaskan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

²³*Ibid hal.6*

Q.S Al-Baqarah :283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَذِقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁴

2.3.2 Indikator transparansi

Menurut Zulfan Nahrudin ada pun indikator-indikator dari transparansi sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi, yang jelas tentang tanggungjawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan akses informasi, Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.²⁵

2.3.3 Prinsip-prinsip transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. artinya, informasi yang berkaitan dengan berkepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan prinsip yang

²⁴ Q.S Al-Baqarah :283

²⁵ Zulfan Nahrudin “Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa didesa pao-pao kecamatan tanete rilau kab barru” (dalam e-jurnal tentang ilmu pengetahuan volume.IV No.2 oktober 2014) h.195

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil tercapai.

Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan

Prinsip-prinsip Transparansi ada 6 ialah sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (Dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
3. Laporan tahunan
4. Website atau media publikasi organisasi
5. Pedoman dalam pembayaran informasi.
6. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
7. Adanya publikasi mengenai detail keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
8. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dana desa (APBDesa) tersebut yang dilakukan pemerintahan desa dan kepada masyarakat.

2.4 Akuntabilitas

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawab.²⁷ Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawab terukur baik dari segi kualitasnya. Pemerintahan daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.²⁸

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala.²⁹ Menurut lembaga administrasi Negara dan badan pengawasan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menamin nilai-nilai seperti isensi,

²⁷ Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 46.

²⁸ Nasihatun dan suryaningtyas, 2015, *Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan*.

²⁹ Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 46.

reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam ialah :

1) Akuntabilitas Vertikal (*verticalaccountability*).

Adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan alokasi dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*).

Adalah pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sector publik :

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountabilitas for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abouse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.

b. Akuntabilitas proses (*proses accountability*).Akuntabilitas proses terkait dengan

apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan prosedur adminitrasi. Dimanefestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, respon, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- c. Akuntabilitas program (*Program accountability*). Untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dipercayai dan apakah ada alternative program lain yang memberikan hasil maksimal dan biaya minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*). Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat.³⁰

Menurut Triyuwono dalam aji dedi mulawarman, akuntabilitas merupakan spirit (ualitas) akuntansi syariah.³¹ konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi islam tentang tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi islam, manusia adalah *khalifahtullah fil ardb* (wakil allah di bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan tuhan. Artinya, lanjut triyuwono dalam aji dedi mulawarman manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan etika syariah, konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Akuntabilitas seperti disebut triyuwono dalam aji dedi mulawarman sebagai prasyarat utama dari akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam (Triyuwono dalam aji dedi mulawarman).³² Dalam hal ini bahwa seorang yang diberi amanah atau jabatan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan,

³⁰Muindro Renyowijoyo (d.3), akuntansi sektor publik :Organisasi non-laba (Jakarta:Mitra wacana media, 2013), h. 1-3.

³¹Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi syariah teori konsep dan laporan keuangan (Jakarta:E publishing Company,2009),h.115

³²*Ibid* h. 1120

dipertanggungjawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

Akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran 159. Yaitu

فَمَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”³³

2.4.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Husai dan lismawati ada pun indikator-indikator akuntabilitas yaitu:

1. Terbuka dimedia masa

Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media masa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.

2. Mudah diakses

Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet (*website*).

³³ QS. Ali Imran 159

3. Ketersediaan informasi

Informasi laporan keuangan yang dipublikasi secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan.³⁴

2.4.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala.³⁵ Menurut lembaga administrasi Negara dan badan pengawasan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menamin nilai-nilai seperti isiensi, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat di perhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan eluruh staf instansi untukmelakukan pengelolaan pelaksanaan misiagar akuntabel.

³⁴ Husaini,lismawati “analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah” dalam (e-jurnal dalam ilmu pengetahuan, volume 3, nomor 1, 2013) h, 25

³⁵Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 47.

- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin menggunakan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).³⁶

2.5 Partisipasi Masyarakat

2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *participation* yang berarti peran, dan secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif. Adi Sasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dan pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan *proyek* yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.³⁷

Defenisi pertama yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai

³⁶*Ibid h. 50*

³⁷Moch.solekha, penyelenggara pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat, Malang. Setara pers, 2014. H. 141

dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana, Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan , baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. sedangkan definisi kedua, dan berlaku universal adalah bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.³⁸

Sedangkan partisipasi masyarakat UNDP adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan apresiasinya.

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan, partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, Masyarakat dalam hal ini diikut sertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan *proyek-proyek* akan gagal.³⁹

2.5.2 Indikator partisipasi masyarakat

Menurut Moch Solekhan ada pun 4 indikator-indikator dalam partisipasi yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
2. Adanya pengawasan dari masyarakat.

³⁸ jurnal berkala ilmiah refisiensi volume 15 no.2 – juni 2015 h. 4

³⁹*Ibid, h,...* 32

3. Ketertiban masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.⁴⁰

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian Putra Adi Kurniawan variabel bebas yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pengelolaan anggaran dana desa.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan adalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian tertarik meneliti kembali variabel transparansi dan akuntabilitas dikarenakan dalam penelitian Putra Adi Kurniawan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti lokasi yang berbeda dan peneliti juga munculkan variabel pembangunan desa.⁴¹

Dalam penelitian Rika andrianti variabel bebas yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sedangkan variabel terikatnya adalah pemberdayaan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian tertarik

⁴⁰ *Ibid, h, ... 46*

⁴¹ Putra adi kurniawan, pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada sekecamatanwates kabupaten kulon progo, 2019

meneliti kembali variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dikarenakan dalam penelitian rika andriyanti akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel pemberdayaan masyarakat di gantikan menjadi pembangunan desa.⁴²

Dalam penelitian Neny Tri Indriasari, variabel bebas yang digunakan adalah perangkat desa dan akuntabilitas, sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan anggaran dana desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Akuntabilitas, dikarenakan Perangkat desa dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa, namun yang dapat membedakan penelitian ini adalah variabel peneliti ini menambahkan variabel transparansi.⁴³

Dalam penelitian Rina susanti sianipar, variabel bebas yang digunakan adalah startegi, partisipasi masyarakat, sedangkan variabel terikatnya adalah pembangunan desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti partisipasi masyarakat, Namun yang membedakan pada penelitian ini ialah penelitian saya memiliki 3 variabel.⁴⁴

Pada penelitian Novindra Dwi setia, variabel bebas yang digunakan adalah Akuntabilitas dan peran perangkat desa, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pengelolaan dana desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah

⁴² rika andriyanti, pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhdap pemberdayaan masyarakat pada desa woro kecamatan kragan kabupaten rembang, 2019

⁴³ Neny tri indrianasari, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa studi pada desa karangsari kecamatan sukodono, 2017

⁴⁴ Rinasusanti sianivar Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa (study kasus desa sei belutu kecamatan sei bamban kabupaten serdang berdagai)

sama-sama meneliti variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah variabel tetapnya yaitu peneliti meneliti pembangunan desa dan peneliti menambahkan variabel bebasnya dengan transparansi, Menurut peneliti berdasarkan penelitian yang lainnya variabel transparansi juga berpengaruh terhadap pembangunan desa.⁴⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

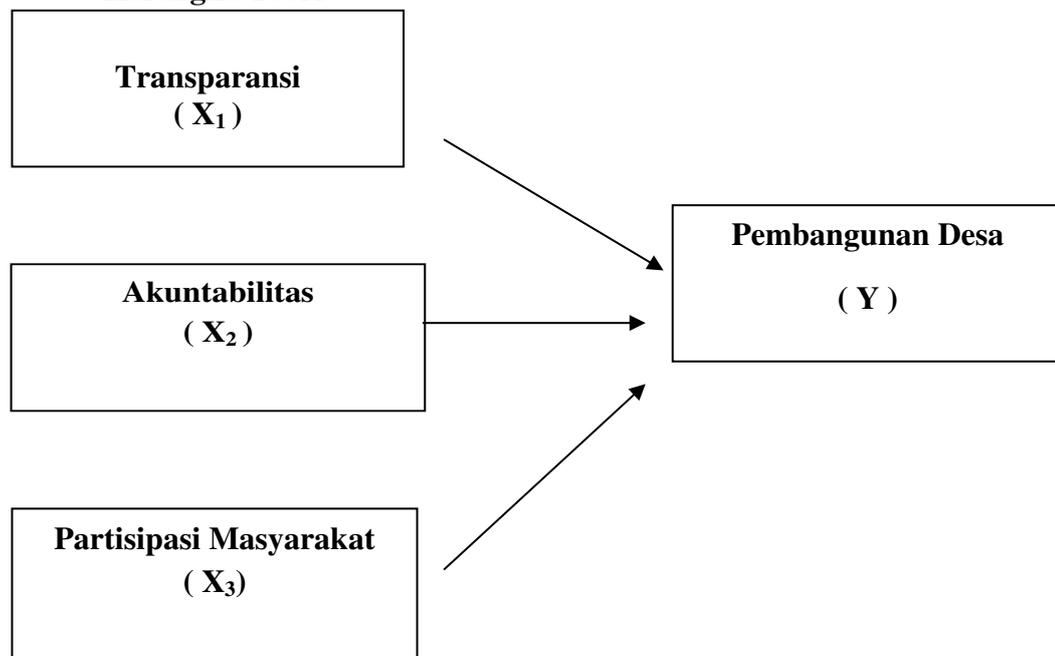
No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putra Adi Kurniawan (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Sekecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo).	-Variabel bebas 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Peran Perangkat Desa -variabel tetap 1. Pengelolaan Keuangan Desa	Kuantitatif (SPSS)	Hasil dari uji t menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan dari peran perangkat desa tidak berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.

⁴⁵ Novindra Dwi Setiana, pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2017

2.	Rika Andrianti (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang	-Variabel Bebas 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi Masyarakat -Variabel tetap 1. pemberdayaan masyarakat	Kuantitatif (SPSS)	Hasil dari uji t menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan.
3.	Neny Tri Indrianasari (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono).	-Variabel Bebas 1. Peran Perangkat Desa 2. Akuntabilitas -Variabel Tetap 1. Pengelolaan Keuangan Desa	Kuantitatif (SPSS)	Penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri No.133 tahun 2014.
4.	Rinasusanti (2017)	Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan	-Variabel bebas 1. Strategi 2. Partisipasi masyarakat -Variabel tetap	Kuantitatif (SPSS)	Berdasarkan strategi yang telah dibuat, pemerintah desa cukup dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

		desa (study kasus desa sei belutu kecamatan sei bamban kabupaten serdang berdagai)	1.Pembangunan Desa		walaupun masyarakat masih kurang dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
5.	Novindra Dwi Setiana (2017)	Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	-Variabel Bebas 1.Akuntabilitas 2.Peran Perangkat Desa -Variabel Tetap 1.Pengelolaan dana desa	Kuantitatif (SPSS)	Hasil uji t menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.7 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Gambar 1.1 dapat menjelaskan ada tiga variabel independen yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat sedangkan pembangunan desa merupakan variabel dependen. Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh langsung terhadap pembangunan desa.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ha1 : Tidak terdapat pengaruh Transparansi secara signifikan terhadap Pembangunan Desa

Ho1 : Terdapat pengaruh Transparansi secara signifikan terhadap Pembangunan Desa

2. Ha2 : Tidak terdapat pengaruh Akuntabilitas secara signifikan terhadap Pembangunan Desa

Ho2 : Terdapat pengaruh Akuntabilitas secara signifikan terhadap Pembangunan Desa

3. Ha3 : Tidak terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat secara signifikan terhadap Pembangunan Desa

Ha3 : Terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat secara signifikan terhadap Pembangunan Desa

4. Ha1 : Tidak terdapat pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pembangunan Desa

Ho3 : Terdapat pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pembangunan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono penelitian deskriptif kuantitatif adalah keakuratan deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya.⁴⁶ Selain itu, penelitian kuantitatif adalah pengukuran data melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang yang diminta untuk menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.⁴⁷

Sifat penelitian ini memakai deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan dan penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Oleh karena itu dalam penelitian ini nantinya akan dijelaskan mengenai adanya hubungan interaktif atau timbal balik antara variabel yang akan diteliti dan sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi.⁴⁸

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 91.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 11.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 420.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.⁴⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁰ Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dngan menggunakan bentuk *Probability sampling*, *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *probability sampling* yang khususnya digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. *simple random sampling* adalah pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi tersebut.⁵¹

⁴⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung:Alfabeta, 2001), h.119.

⁵⁰*Ibid*, h120

⁵¹Azuar Juliandi dan irfan, *Metodologi penelitian kuantitatif: Untuk ilmu-ilmu bisnis*, (Bandung:Citapustaka Media Perintis, 2013), h.58

Penentuan jumlah sampel ini menggunakan rumus slovin.⁵²

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$= \frac{1877}{1+1877 (0,1)^2} = \frac{1877}{1+1877(0,01)} = \frac{1877}{1+18,77} = \frac{1877}{19,77} = 94,9 \text{ Digenapkan menjadi } 95.$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persentase ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

Dari hasil perhitungan diatas yang menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 95 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teknik, yaitu :

1. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁵³ Hasil dari kuisisioner yang terkumpul, kemudian dijadikan bahan untuk dianalisa secara kuantitatif. Pengukuran dari pertanyaan/pernyataan kuisisioner yang telah dijawab oleh responden menggunakan skala *likert*. Dengan skala *likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

⁵²Nurmasalam, metode penelitian, (Jakarta: salemba medika, 2013), h.176

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*.....h. 135.

indikator tersebut menjadi titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan maupun pertanyaan.⁵⁴

Dalam hal ini responden menanggapi lima alternatif jawaban yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Kurang Setuju (KS), Setuju (TS) terhadap pertanyaan mengenai item dimensi pada variabel bebas dan variabel terikat. Dan dibuat menggunakan skala 1 – 5 untuk mewakili pendapat responden. Nilai untuk skala tersebut yaitu sebagai berikut.⁵⁵

Tabel 3.1
Skala Likert

No.	SIMBOL	ALTERNATIF JAWABAN	NILAI
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	RR	Ragu-ragu	3
4	KS	Kurang Setuju	2
5	TS	Tidak Setuju	1

2. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa literatur tertulis baik dari buku-buku pedoman, artikel, makalah dan sumber lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai sumber mulai dari perpustakaan hingga situs internet.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, h. 132.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, cet ke-10, 2010), h. 140

⁵⁶ Moh. Pradana, Sidik, Dan Saludin Muis. “*Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). H 114

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁵⁷ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner/angket terhadap masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara.⁵⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, *literature*, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Identifikasi dan Operasional Variabel

3.6.1 Identifikasi Variabel

Dalam Penelitian ini variabel yang terdiri dari variabel-variabel yang akan diuji peneliti, yaitu:

1. Variabel Bebas (Variabel *Independen*) adalah variabel yang mempengaruhi perubahan pada variabel terikat, terdiri dari transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3).

⁵⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafind Persada, 2008), h. 103.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 108

2. Variabel Terikat (Variabel *Dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya perubahan dari variabel bebas, yaitu variabel pembangunan desa (Y).

3.6.2 Definisi Operasionalisasi Variabel

1. Transparansi (X1), transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan.
2. Akuntabilitas (X2), akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawab terukur baik dari segi kualitasnya.
3. Partisipasi Masyarakat (X3), partisipasi merupakan keterlibatan dan melibatkan masyarakat dan pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan *proyek* yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.
4. Pembangunan Desa (Y), adalah Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan

berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Transaparansi (X ₁)	Transparansi (<i>transparency</i>) secara harfiah adalah jelas (<i>obvious</i>), dapat dilihat secara menyeluruh (<i>oble nto be seen through</i>). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suartu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan <i>good Governance</i> . Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan (<i>fairness</i>) dapat ditumbuhkan	1.Penyediaan Informasi 2.Kemudahan akses informasi 3.Meningkatkan Arus Informasi	Skala Litert
Akuntabilitas (X ₂)	Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris <i>accountability</i> yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawab. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk	1.Keterbukaan Informasi 2.Mudah akses 3.Kesediaan Infomasi	Skala Litert

	mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawab terukur baik dari segi kualitasnya.		
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan masyarakat dan pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan <i>proyek</i> yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.	1.Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa 2.Adanya pengawasan dari masyarakat. 3.Ketertiban masyarakat dalam penerimaan manfaat.	Skala Litert
Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara	1.Sarana ekonomi 2.Tingkat pendidikan 3.Tingkat kesehatan.	Skala Litert

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur.

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel maka dilakukan uji validitas. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok tertentu yaitu motivasi, pelatihan kerja, reward dan kinerja karyawan. Menurut Nugroho nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-k$, k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi pada penelitian ini di dapatkan hasil $df = 95-2 = 93$. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r -hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item Total > r -tabel. Apabaila validitas setiap jawaban yang diperoleh ketika memberikan daftar pernyataan lebih besar dari 0,324 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Selain mengetahui validitas alat ukur yang digunakan untuk penelitian ini perlu diketahui juga konsistensi atau reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan pendapat Nugroho, reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang

berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > dari 0,60. Untuk mempermudah menguji validitas angket dan reliabilitas angket akan dibantu dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Packages for the Social Science*). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*.⁵⁹

Untuk mengetahui hasil uji reliabilitas, maka dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai alpha (α) dengan nilai r_{tabel} . Jika nilai alpha (α) lebih besar dari r_{tabel} , maka hasilnya adalah reliabel.⁶⁰

3.7.3 Metode Analisa Data

Metode analisa data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif statistik kuantitatif. Analisis deskriptif statistik kuantitatif merupakan metode yang dilakukan dengan pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

3.8 Model Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau variabel bebas (dependen) terhadap satu variabel terikat. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah :⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, h. 279.

⁶⁰ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivarite dengan program SPSS*, (Semarang, Bandar Penerbit UNDIP, 2005), h. 48.

⁶¹ *Ibid*, h. 50.

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Pembangunan Desa
α	: Konstanta
$b_1 b_2 b_3$: Koefisien korelasi ganda
X_1	: Transparansi
X_2	: Akuntabilitas
X_3	: Partisipasi Masyarakat
e	: Standar <i>Error</i>

3.10 Uji Asumsi Klasik

3.10.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya data distribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model berdistribusi normal dan setidaknya mendekati normal. Grafik normal P-P plot digunakan untuk mendeteksi normalitas yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji normalisasi akan lulus jika distribusi normal garis yang menggambarkan data seungguhnya akan mengikuti garis diagonal.⁶²

3.10.2 Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. Uji linieritas dilakukan dengan analisis tabel ANOVA, criteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah nilai koefisien signifikan. Jika nilai koefisien signifikan lebih

⁶²Sanggih Santoso, Buku Latihan SPSS..., h. 277

besar dari alpha 5% atau 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa garis regresi berbentuk linear.⁶³

3.10.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel bebas. Variabel bebas harus terbebas dari korelasi yang kuat antara suatu variabel bebas dikarenakan hubungan tersebut akan mengganggu korelasi antara suatu variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji Multikolinearitas ditinjau dari *variance inflationfaktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan VIF >10. Jika nilai VIF tidak ada yang lebih 10, maka dapat dikatakan bahwa Multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos Uji Multikolinearitas).

3.10.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedasititas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteokedastisitas dapat dilihat pada tabel scatterplot. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Asumsinya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

⁶³Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNIDIP,2005), h. 147

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.⁶⁴

3.10.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menjelaskan bahwa persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji durbin watson (DW) dengan ketentuan:

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- c. Terjadi autokorelasi negative, jika DW diatas +2 atau $DW > +2$.⁶⁵

3.11 Uji Parsial (Uji T) Dan Uji Simultan (Uji F)

3.11.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5 %) dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Jika nilai Sig $< \alpha$ maka H_0 ditolak artinya H_a diterima.
- b. Jika nilai Sig $> \alpha$ maka H_a diterima artinya H_0 ditolak.

⁶⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: alfabeta, 2008), h.125-126.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1996), h.282.

⁶⁶*Ibid.* h. 88.

Atau dapat dilihat juga dengan menggunakan perbandingan t_{hitung} yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a diterima.

3.11.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Pengambilan kesimpulannya dengan melihat taraf signifikan 5% (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Satu. Sebaiknya variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat nilai R^2 adalah nol. Kelemahan mendasar penggunaan koefisiensi determinasi adalah Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (artinya ada pengaruh yang signifikan antar variabel (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap variabel terikat (Y)).
- b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a diterima (artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap variabel terikat (Y)).

2.12 Uji Kofisien Determinan (R^2)

Untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas mampu memberikan penjelasan mengenai variabel terikat maka perlu dicari nilai koefisiensi (R^2). Nilai R^2 adalah nol dan satu. Variabel bebas akan semakin kuat menjelaskan variabel

⁶⁷*Ibid.*,h.82.

terikat apabila nilai R^2 semakin mendekati bias terdapat jumlah variabel independen dimasukkan kedalam model.⁶⁸

⁶⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian ...*, hl. 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang

Legenda sejarah pembangunan desa tanjung genteng diawali oleh keinginan sekelompok orang beberapa puluh tahun lalu untuk membangun sebuah perdesaan disisi sungai tamiang dan perkebunan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) yang bergerak dibidang perkebunan karet. pada mulanya desa tanjung genteng hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga saja. Seiring dengan perkembangan jaman sekitar tahun 60an banyak warga perkebunan yang pindah dan menetap di desa ini.⁶⁹

Sekitar tahun 1960-1970 banyak warga membuka lahan pertanian disekitar desa tanjung genteng, sehingga pemerintahan desa tanjung genteng luas dan terbagi menjadi 4 dusun yaitu:

1. Dusun Alur selamat
2. Dusun Tualang
3. Dusun Bandar Baru
4. Dusun Gerenggam Batu

Menurut sejarah para sesepuh desa, nama tanjung genteng sendiri diambil dari nama sungai yang melingkari pemukiman penduduk yang berbentuk lengkungan yang hampir memutus perdesaan, desa tanjung genteng dan legenda itu sampai saat ini masih dapat kita lihat. Kampung tanjung genteng awal mulanya

⁶⁹Profil Kampong Tanjung Genteng, h. 5

bernama Desa tanjung genting, namun tanpa kesadaran dan menjadi kebiasaan dalam penyebutannya nama desa ini berubah menjadi tanjung genteng.⁷⁰

Desa Tanjung Genteng merupakan salah satu desa yang terletak di kemukiman bukit rata kecamatan kejuruan muda, kabupaten aceh tamiang yang berjarak 10 KM dari ibukota kecamatan, dan dengan kota kabupaten berjarak 20 KM. Hal ini yang menjadikan desa tanjung genteng saat ini masih tertinggal jauh dengan desa-desa lain yang terdapat di kabupaten aceh tamiang, terutama dari segi pembangunan insfrastruktur seperti, Jalan, jembatan, sarana air bersih, kantor datok penghulu dll. Luas wilayah desa tanjung genteng 1.145 Ha, yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu dusun alur selamat, dusun tualang, dusun gerenggam batu, serta dusun dusun bandara baru dengan jumlah penduduk 1.877 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencahariannya sebagai petani, perkebunan, sebagian kecil pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta dan lainnya berdagang.⁷¹

Wilayah Desa Tanjung genteng terleta pada ketinggian antara 0-500 meter diatas permukaan laut. Lahan di desa tanjung genteng mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Suhu udara rata-rata setiap hari berkisar 30C.

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Tanjung Genteng

a. Visi Desa Tanjung Genteng

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan natau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan

⁷⁰*Ibid*, h. 5.

⁷¹*Ibid*, h .6.

kekuatan, semangat dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sehingga pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, maka visi desa tanjung genteng adalah terbangunnya Desa tanjung genteng dengan mengedepankan sumber daya alam dan manusia, yaitu dengan meningkatkan SDM, memberantas kemiskinan, pembangunan infrastuktur, dan tetap berorientasi pada kepentingan umum sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

b. Misi Desa Tanjung Genteng

Misi kampung tanjung genteng yang diemban atau dilaksanakan oleh Kampung tanjung genteng untuk mencapai visi yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Membangun kelengkapan sarana infrastruktur kampung
2. Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian
3. Membangun fasilitas sanitasi dipermukiman kampung
4. Membangun fasilitasi pendidikan agama dan kesehatan
5. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kampung⁷²

4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Tanjung Genteng

Desa Tanjung Genteng mempunyai jumlah penduduk yang apa bila dilihat

⁷²*Ibid, h. 6*

dari jenis kelamin 946 jiwa Laki-laki, dan 931 jiwa perempuan, Maka total jumlah penduduk desa tanjung genteng adalah 1.877 jiwa .

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Genteng

Desa	Jumlah Penduduk		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Tanjung Genteng	946 Jiwa	931 Jiwa	1.877 Jiwa

Sumber BPS Aceh Tamiang

Ada pun kualitas produk yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang akan menjadi sumber daya manusia yang dapat memajukan desanya. Dalam hal ini penduduk menurut tingkat perkembangan pendidikan masyarakat desa tanjung genteng dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi bisa di lihat dalam tabel sebagai berikut.

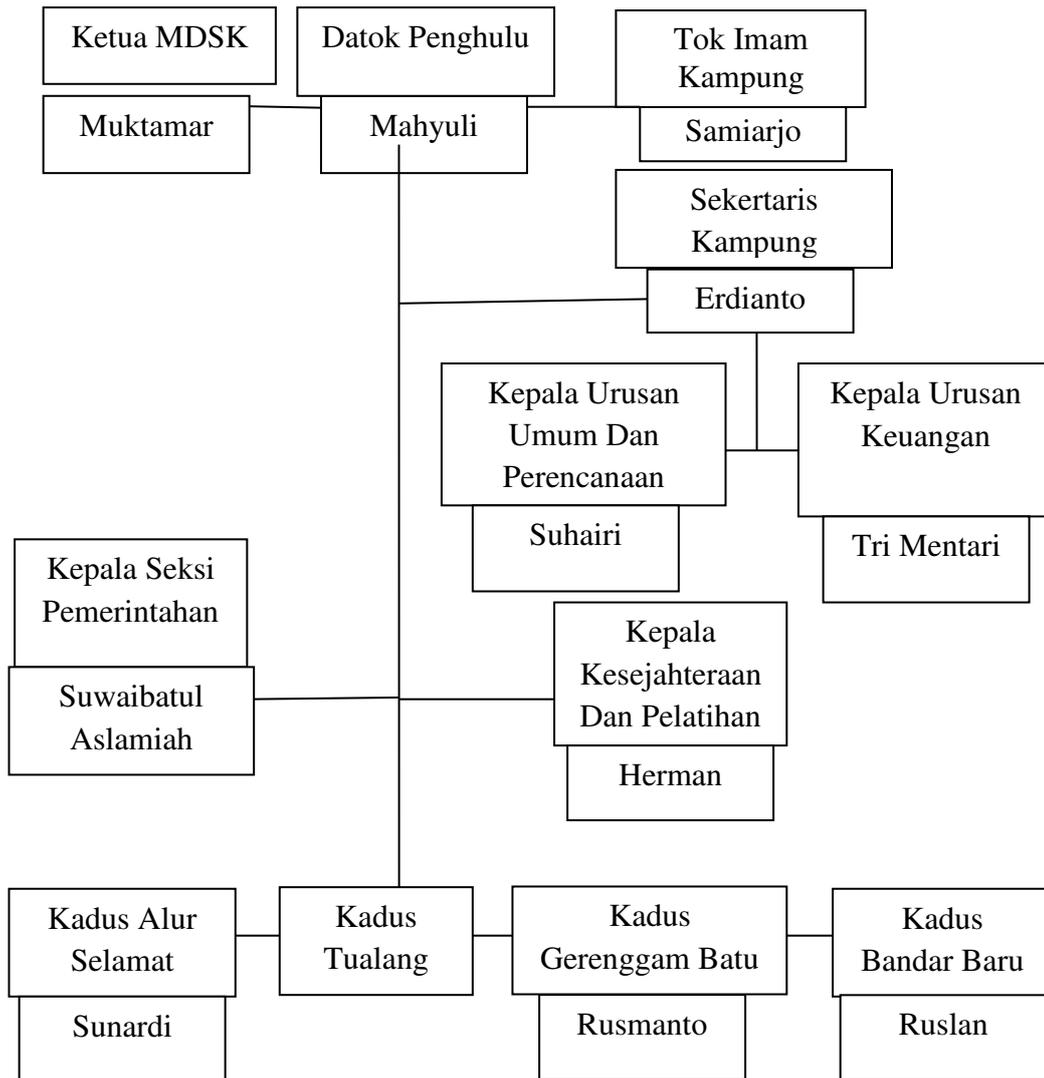
Tabel 4.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak tamat SD	758 Jiwa	40.38 %
Tamat SD	698 Jiwa	37.18 %
Tamat SMP	252 Jiwa	13.42 %
Tamat SMA ke atas	169 Jiwa	9.2 %
Jumlah	1.877 Jiwa	100 %

Sumber BPS Aceh Tamiang

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Tanujung Genteng

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada desa dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang

Pembagian tugas dan dari pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki tugas dan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa. Tugas kepala desa dalam mengelola dana desa sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa termasuk dalam penggunaan dana desa.
 - b. Menetapkan PTPKD (pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa) atau perangkat desa dalam hal ini termasuk pengelolaan dana desa.
 - c. Bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintah dalam menggunakan dana desa.
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - e. Melakukan pengawasan selaku penanggung jawaban pengelolaan dana desa terhadap kegiatan yang dilakukan.
 - f. Mengesahkan rincian anggaran biaya untuk pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.
2. Sekretaris Desa sebagai coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang dalamnya termasuk pengelolaan dana desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
 - b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - c. Melakukan pengadil terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
3. Bendahara Desa mempunyai tugas yaitu menerima, menyampaikan, menyetor/membayar, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
4. Kaur Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu:
- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan.
 - d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
 - e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataab kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.
5. Kaur Pembangunan sebagai pelaksanaan kegiatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan /bersama lembaga masyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaa kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa .
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Adapun anggaran dari pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.237.032.000 diterima oleh datok Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang, dan adapun dimana perencanaan pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat
2. Peningkatan sarana ibadah pembinaan
3. Peningkatan sarana prasarana bangunan jalan lingkungan
4. Peningkaan pemberdayaan masyarakat ⁷³

Dan anggaran dari pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.690.925.731 diterima oleh datok Tanjung Genteng Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang, dan adapun dimana perencanaan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat
2. Peningkatan sarana ibadah pembinaan
3. Peningkatan sarana prasarana bangunan jalan lingkungan

⁷³APBD Tahun 2020

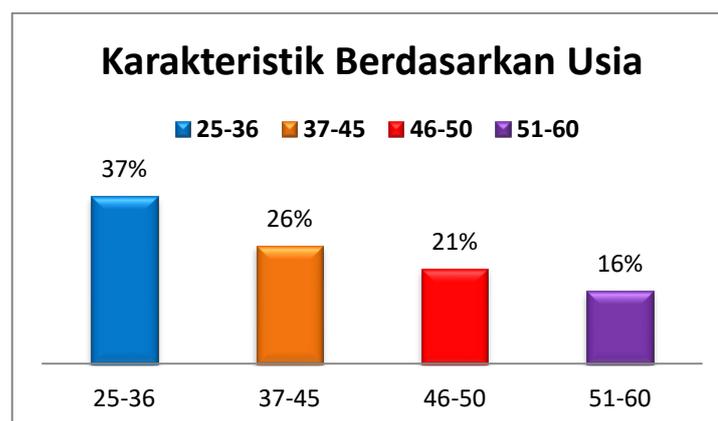
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ⁷⁴

4.1.5 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini yang menjadi kriteria responden adalah masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun rincian karakteristik responden dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia pada masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :



Gambar 4.2 Karakteristik Berdasarkan Usia

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah (2021)

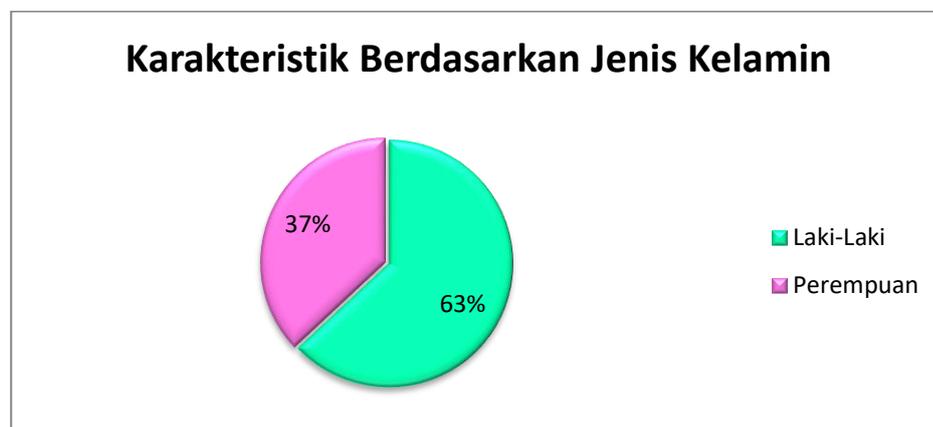
Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kelompok usia responden yang paling dominan adalah masyarakat yang berusia 25-36 tahun sebanyak 35 orang atau sebesar (37%), kemudian di ikuti oleh masyarakat yang berusia 37-45 tahun sebanyak 25 orang (26%), masyarakat yang berusia 46-50 tahun sebanyak

⁷⁴ APBD tahun 2021

20 orang (21%), lalu diikuti oleh masyarakat berusia 51-60 tahun sebanyak 15 orang (16%). Mayoritas karakteristik responden berdasarkan usia adalah 25-36 tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin usia pada masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :



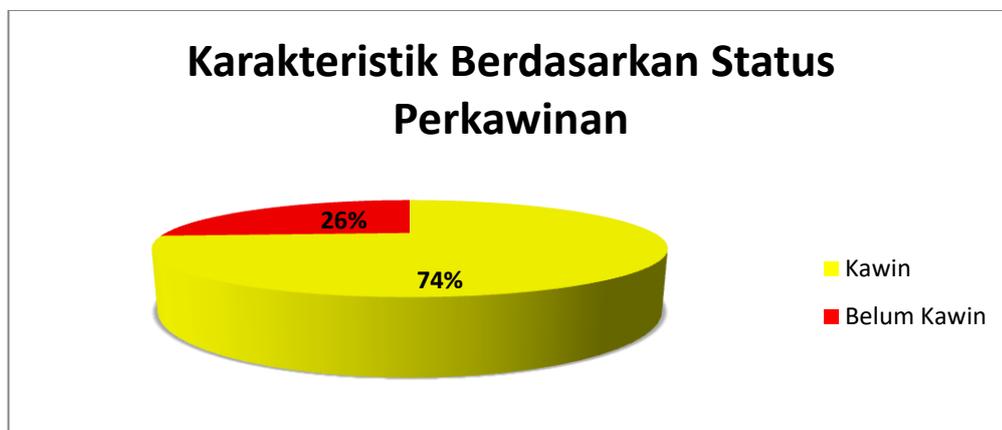
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa 63% adalah responden laki-laki sebanyak 60 orang dan 37% adalah responden perempuan sebanyak 35 orang atau 37%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang yang paling dominan adalah laki-laki sebanyak 60 orang atau sebesar 63%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan pada masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :



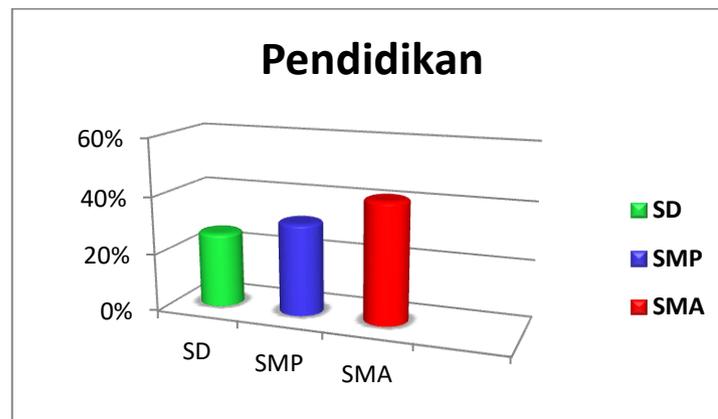
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa 74% adalah responden yang sudah kawin sebanyak 70 orang dan 26% adalah responden yang belum kawin sebanyak 25 orang.

4. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada masyarakat di Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :



Gambar 4.5 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa kelompok berdasarkan pendidikan di dominankan oleh responden yang berpendidikan SMA sebanyak 40 orang atau sebesar (42%), kemudian diikuti oleh masyarakat yang berpendidikan SMP sebanyak 30 orang (32%) dan sisanya oleh masyarakat berpendidikan SD sebanyak 25 orang atau (26%).

4.1.6 Penjelasan Responden Berdasarkan Variabel Penelitian

1. Penjelasan Responden Berdasarkan Variabel Transparansi (X1)

Penjelasan responden terhadap variabel transparansi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3

Penjelasan Responden Pada Variabel Transparansi

No	Pernyataan	SS = 5		S = 4		RR = 3		KS = 2		TS = 1		Total		Rata-rata Skor	Kategori
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor		
1	Penyediaan dan penyampaian informasi jelas dan sudah dipertanggungjawabkan oleh perangkat Desa Tanjung Genteng.	18	90	50	200	24	72	3	6	0	0	95	368	3,87	Setuju
2	Pengumuman untuk	7	35	43	172	36	108	9	18	0	0	95	333	3,50	Setuju

	pengaduan atau pengomplinan jika peraturan dilanggar tentang adanya suap menyuap telah dilakukan oleh perangkat Desa Tanjung Genteng.														
3	Adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah dalam peningkatan informasi yang ada di Desa Tanjung Genteng.	19	95	33	132	38	114	5	10	0	0	95	351	3,69	Setuju

Sumber: Hasil penelitian, Data diolah (2021)

Rata-rata skor dilihat dari skala interval

STS = 0,00 – 1,80 TS = 1,81 -2,60 KS = 2,61 – 3,40 S = 3,41 – 4,20 SS = 4,21 – 5,00

Penjelasan reponden mengenai variabel transparansi pada butir pernyataan pertama menyatakan bahwa 18 responden (19%) sangat setuju, 50 responden (53%) menyatakan setuju, 24 responden (25%) menyatakan ragu-ragu, dan 3 responden (3%) menyatakan kurang setuju.

Penjelasan reponden mengenai variabel transparansi pada butir pernyataan kedua menyatakan bahwa 7 responden (7%) sangat setuju, 43 responden (45%) menyatakan setuju, 36 responden (38%) menyatakan ragu-ragu dan 2 responden (2%) menyatakan kurang setuju.

Penjelasan reponden mengenai variabel transparansi pada butir pernyataan ketiga menyatakan bahwa 18 responden (20%) sangat setuju, 33 responden (35%) menyatakan setuju, 38 responden (40%) menyatakan ragu-ragu, dan 5 responden (5%) menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Pada Variabel Akuntabilitas

No	Pernyataan	SS = 5		S = 4		RR = 3		KS = 2		TS = 1		Total		Rata-rata Skor	Kategori
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor		
1	Kepada Desa Tanjung Genteng menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada media massa.	14	70	53	212	28	84	0	0	0	0	95	366	3,85	Setuju
2	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan dapat mudah di akses di media massa.	3	15	48	192	43	129	0	0	1	1	95	337	3,54	Setuju
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan dan dipublikasikan secara lengkap.	4	20	30	120	61	183	0	0	0	0	95	323	3,4	Kurang Setuju

Sumber: Hasil penelitian, Data diolah (2021)

Rata-rata skor dilihat dari skala interval

STS = 0,00 – 1,80 TS = 1,81 -2,60 KS = 2,61 – 3,40 S = 3,41 – 4,20 SS = 4,21 – 5,00

Penjelasan reponden mengenai variabel akuntabilitas pada butir pernyataan pertama menyatakan bahwa 14 responden (15%) sangat setuju, 53 responden (56%) menyatakan setuju, dan 28 responden (29%) menyatakan ragu-ragu.

Penjelasan reponden mengenai variabel akuntabilitas pada butir pernyataan kedua menyatakan bahwa 3 responden (3%) sangat setuju, 48 responden (51%) menyatakan setuju, 43 responden (45%) menyatakan ragu-ragu dan 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju.

Penjelasan reponden mengenai variabel akuntabilitas pada butir pernyataan ketiga menyatakan bahwa 4 responden (4%) sangat setuju, 30 responden (32%) menyatakan setuju, 61 responden (64%) menyatakan ragu-ragu.

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Pada Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	SS = 5		S = 4		RR = 3		KS = 2		TS = 1		Total		Rata-rata Skor	Kategori
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor		
1	Masyarakat Desa Tanjung Genteng bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.	12	60	39	156	41	123	3	6	0	0	95	345	3,63	Setuju
2	Masyarakat Desa Tanjung Genteng bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.	5	25	25	100	29	87	36	72	0	0	95	284	2,98	Kurang Setuju
3	Masyarakat Desa Tanjung Genteng bersedia menjaga dan melestarikan hasil dari program yang dilaksanakan oleh desa.	7	35	31	124	55	165	1	2	1	1	95	327	3,44	Setuju

Sumber: Hasil penelitian, Data diolah (2021)

Rata-rata skor dilihat dari skala interval

STS = 0,00 – 1,80 TS = 1,81 -2,60 KS = 2,61 – 3,40 S = 3,41 – 4,20 SS = 4,21 – 5,00

Penjelasan reponden mengenai variabel partisipasi masyarakat pada butir pernyataan pertama menyatakan bahwa 12 responden (13%) sangat setuju, 39 responden (41%) menyatakan setuju, 41 responden (43%) menyatakan ragu-ragu, dan 2 responden (2%) menyatakan kurang setuju.

Penjelasan responden mengenai variabel partisipasi masyarakat pada butir pernyataan kedua menyatakan bahwa 5 responden (5%) sangat setuju, 25 responden (26%) menyatakan setuju, 29 responden (31%) menyatakan ragu-ragu, dan 36 responden (38%) menyatakan kurang setuju.

Penjelasan responden mengenai variabel partisipasi masyarakat pada butir pernyataan ketiga menyatakan bahwa 7 responden (7%) sangat setuju, 31 responden (32%) menyatakan setuju, 55 responden (58%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (1%) menyatakan kurang setuju dan 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.6

Penjelasan Responden Pada Variabel Pembangunan Desa

No	Pernyataan	SS = 5		S = 4		RR = 3		KS = 2		TS = 1		Total		Rata-rata Skor	Kategori
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor		
1	Tingkat pencapaian program pembangunan desa seperti parit, pemeliharaan lapangan desa dan meningkatkan ekonomi Desa Tanjung Genteng telah terlaksana.	14	70	36	144	36	144	9	0	0	0	95	376	3,95	Setuju
2	Tingkat pencapaian program pembangunan dan pemeliharaan sekolah (pendidikan) yang ada di Desa Tanjung Genteng telah terlaksana.	6	30	58	232	31	93	0	0	0	0	95	355	3,73	Setuju
3	Tingkat pelaksana program pemberi	4	20	30	120	61	183	0	0	0	0	95	323	3,4	Kurang Setuju

layanan posyandu ibu hamil, balita dan lansia yang ada di Desa Tanjung Genteng telah terlaksana.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian, Data diolah (2021)

Rata-rata skor dilihat dari skala interval

STS = 0,00 – 1,80 TS = 1,81 -2,60 KS = 2,61 – 3,40 S = 3,41 – 4,20 SS = 4,21 – 5,00

Penjelasan reponden mengenai variabel pembangunan desa pada butir pernyataan pertama menyatakan bahwa 14 responden (15%) sangat setuju, 36 responden (38%) menyatakan setuju, 36 responden (38%) menyatakan ragu-ragu dan 9 responden menyatakan (9%) kurang setuju.

Penjelasan reponden mengenai variabel pembangunan desa pada butir pernyataan kedua menyatakan bahwa 6 responden (6%) sangat setuju, 58 responden (61%) menyatakan setuju, dan 31 responden (33%) menyatakan ragu-ragu.

Penjelasan reponden mengenai variabel pembangunan desa pada butir pernyataan ketiga menyatakan bahwa 4 responden (4%) sangat setuju, 30 responden (32%) menyatakan setuju, dan 61 responden (64%) menyatakan ragu-ragu.

4.1.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 20,0 yang bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap butir pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden telah dinyatakan valid atau tidak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik korelasi, yaitu dengan membandingkan hasil

koefisien korelasi r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika koefisien korelasi r hitung lebih besar dari r tabel maka butir-butir penelitian ini dikatakan valid. Dengan menggunakan $df = 95-2=93$ didapatkan r tabel = 0,202. Dari hasil uji validitas diperoleh tabel sebagai berikut

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	Nilai Kritis (r tabel)	Keterangan
Transparansi (X₁)			
Penyediaan dan penyampaian informasi jelas dan sudah dipertanggungjawabkan oleh perangkat Desa Tanjung Genteng.	0,709	0,202	Valid
Pengumuman untuk pengaduan atau pengomplinan jika peraturan dilanggar tentang adanya suap menyuap telah dilakukan oleh perangkat Desa Tanjung Genteng.	0,610	0,202	Valid
Adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah dalam peningkatan informasi yang ada di Desa Tanjung Genteng.	0,669	0,202	Valid
Akuntabilitas (X₂)			
Kepada Desa Tanjung Genteng menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada media massa.	0,740	0,202	Valid
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan dapat mudah di akses di media massa.	0,674	0,202	Valid
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan dan dipublikasikan secara lengkap.	0,751	0,202	Valid
Partisipasi Masyarakat (X₃)			
Masyarakat Desa Tanjung Genteng bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian,	0,676	0,202	Valid

keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.			
Masyarakat Desa Tanjung Genteng bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.	0,667	0,202	Valid
Masyarakat Desa Tanjung Genteng bersedia menjaga dan melestarikan hasil dari program yang dilaksanakan oleh desa.	0,645	0,202	Valid
Pembangunan Desa (Y)			
Tingkat pencapaian program pembangunan desa seperti parit, pemeliharaan lapangan desa dan meningkatkan ekonomi Desa Tanjung Genteng telah terlaksana.	0,680	0,202	Valid
Tingkat pencapaian program pembangunan dan pemeliharaan sekolah (pendidikan) yang ada di Desa Tanjung Genteng telah terlaksana.	0,759	0,202	Valid
Tingkat pelaksana program pemberi layanan posyandu ibu hamil, balita dan lansia yang ada di Desa Tanjung Genteng telah terlaksana.	0,745	0,202	Valid

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Pada tabel dari hasil perhitungan koefisien korelasi seluruhnya mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} ($r_{tabel} = 0,202$). Dengan probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dan pernyataan pada instrumen baik dari pertanyaan dan pernyataan variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur penelitian. Artinya semua pertanyaan dan pernyataan yang dicantumkan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, sehingga mampu mengungkap data yang dapat dipercaya. Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan data yang tinggi didapatkan apabila fakta yang telah dikumpulkan tidak akan mengalami perubahan apabila dilakukan pengujian ulang. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha $> 0,60$. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha (α)	Keterangan
Transparansi (X1)	0,746	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,786	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,744	Reliabel
Pembangunan Desa (Y)	0,780	Reliabel

Sumber: Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui seluruh koefisien reliabilitas lebih besar dari nilai standar alpha yaitu 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari butir-butir pertanyaan dan pernyataan mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa merupakan jawaban pertanyaan dan pernyataan yang reliabel atau handal. Artinya jawaban pertanyaan dan pernyataan mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa konsisten dan stabil.

4.1.8 Model Analisis Data

Model analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau variabel bebas (dependen) terhadap satu variabel terikat. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah :⁷⁵

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Pembangunan Desa
α	: Konstanta
$b_1 b_2 b_3$: Koefisien korelasi ganda
X_1	: Transparansi
X_2	: Akuntabilitas
X_3	: Partisipasi Masyarakat
e	: Standar <i>Error</i>

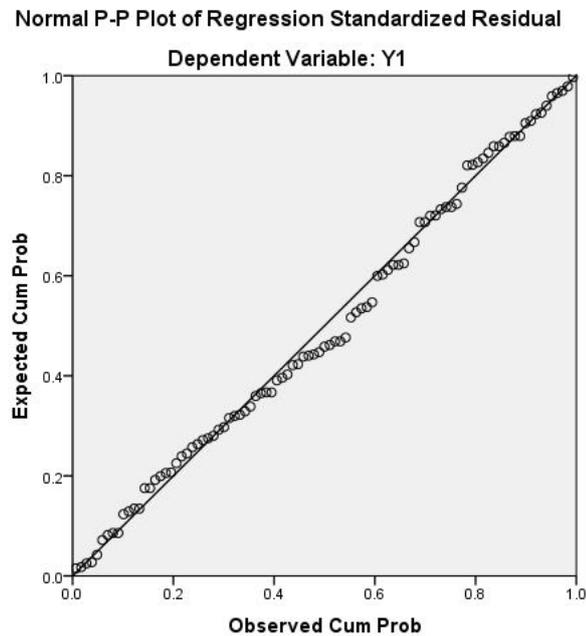
4.1.9 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model yang tinggi adalah yang memiliki distribusi data yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik normal plot menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, hal ini berarti data berkompetensi normal. Analisis grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

⁷⁵*Ibid*, h. 50.

Gambar 4.6
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Berdasarkan grafik normal p-plot of regression standardized residual terlihat adanya titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal sedangkan penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji Kolmogorov Smirnov Test antara lain sebagai berikut.

Tabel 4.9
Hasil One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		X1	X2	X3	Y1
N		95	95	95	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	11.0526	10.7789	10.0526	10.6842
	Std. Deviation	1.55993	1.32230	1.55993	1.70271

	Absolute	.139	.192	.129	.153
Most Extreme Differences	Positive	.135	.192	.129	.153
	Negative	-.139	-.124	-.128	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		1.356	1.867	1.258	1.489
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050	.002	.085	.024

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa

besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah:

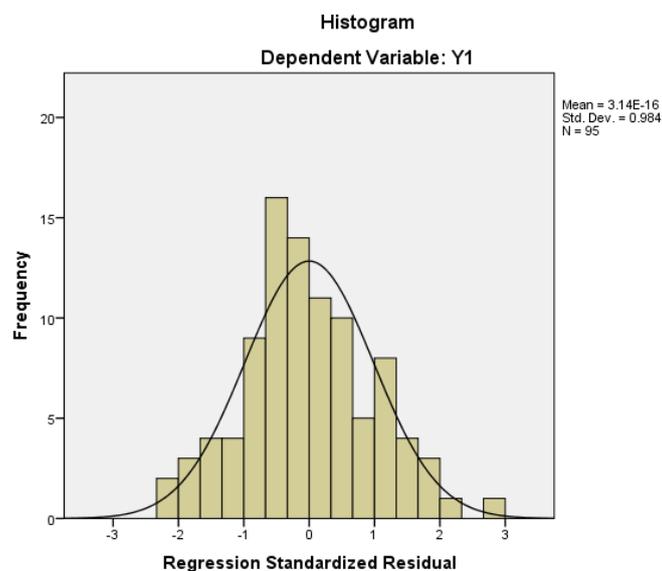
$X1 = 1.356 > 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.

$X2 = 1.867 > 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.

$X3 = 1.258 > 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.

$Y = 1.489 > 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.

Gambar 4.7
Histogram



Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot, dapat di simpulkan grafik histogram memberikan pola yang seimbang. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya tidak terlalu jauh atau melebar. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak digunakan.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas garis regresi merupakan suatu pembuktian apakah model garis linear yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaanya atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau analisis tabel ANOVA. Kriteria yang ditetapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah nilai koefisien signifikansi. Jika koefisien signifikansi lebih besar dari α yang ditentukan, yaitu 5%, maka dapat dinyatakan bahwa garis regresi bentuk linear. *Out put* analisis tabel ANOVA adalah:

Tabel 4.10
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
		(Combined)	65.031	7	9.290	3.895	.001
	Between	Linearity	55.409	1	55.409	23.232	.000
Y1 *	Groups	Deviation from	9.622	6	1.604	.672	.672
X1		Linearity					
	Within	Groups	207.495	87	2.385		
	Total		272.526	94			

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	(Combined)	44.357	6	7.393	2.851	.014
Y1 *	Between Linearity	32.751	1	32.751	12.631	.001
X2	Groups Deviation from Linearity	11.606	5	2.321	.895	.488
	Within Groups	228.170	88	2.593		
	Total	272.526	94			

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	(Combined)	96.645	9	10.738	5.190	.000
Y1 *	Between Linearity	63.563	1	63.563	30.719	.000
X3	Groups Deviation from Linearity	33.082	8	4.135	1.998	.056
	Within Groups	175.881	85	2.069		
	Total	272.526	94			

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Hasil Uji linearitas menunjukkan nilai koefisien signifikansi X_1 (0,672), X_2 (0,488) dan X_3 (0,056) artinya lebih besar dari alpa yang ditentukan yaitu 0,05 yang berarti bahwa garis regresi berbentuk linear.

3. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear atau tidak. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. “Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat

dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinearitas).”⁷⁶ Adapun hasil dari pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Transparansi (X_1)	0,990	1.010
Akuntabilitas (X_2)	0,873	1.146
Partisipasi Masyarakat (X_3)	0,886	1.155

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Hasil uji multikolinearitas (uji VIF) Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1, yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas. Artinya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

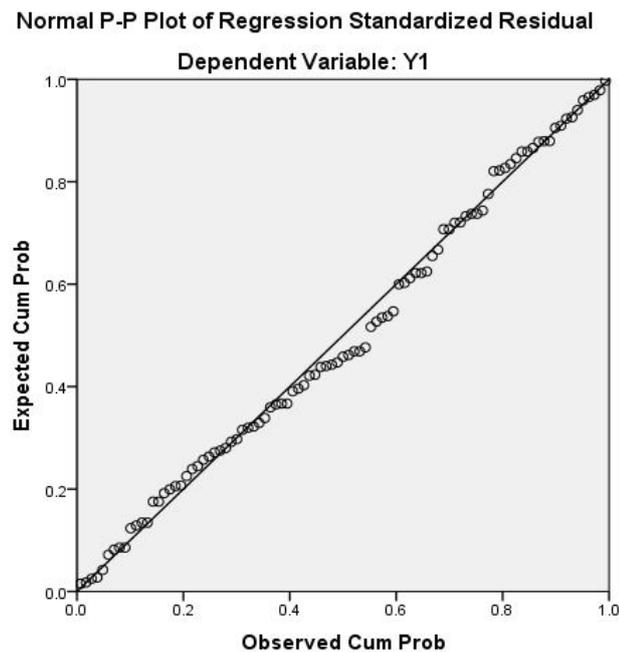
4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heteroskedastisitas untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan variabel independen. Dari scatterplots

⁷⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005), h. 95.

terlihat titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Dibawah ini terdapat gambar heteroskedastisitas.

Gambar 4.8
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Berdasarkan output diatas terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu regression studentized residual. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heterokesdasitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heterokesdasitas.

5. Uji Autokorelasi

Pemeriksaan autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson, dimana jika nilai DW diantara -2 sampai 2, maka asumsi tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 ^a	.430	.411	1.30626	1.985

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Dari hasil tabel diperoleh nilai DW berada diantara -2 dan 2, maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi.

4.1.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 20.0 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.13
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.995	1.493	.405	-.667	.507
	X1	.442	.087	.195	5.088	.000
	X2	.251	.109	.373	2.298	.024
	X3	.408	.093		4.391	.000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Hasil analisis regresi berganda terhadap pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa

Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -0,995 + 0,442 (X_1) + 0,251 (X_2) + 0,408 (X_3)$$

Keterangan:

Y	= Pembangunan Desa
b ₀ dan b ₁ , b ₂ , b ₃	= Konstanta
X ₁	= Transparansi
X ₂	= Akuntabilitas
X ₃	= Partisipasi Masyarakat
e	= error

Pembahasan :

-0,995 (Constant) : Jika tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat tidak ada atau nilainya adalah 0, maka pembangunan desa sebesar -99,5%.

0,442 (X₁) : Jika setiap penambahan variabel transparansi sebesar satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka pembangunan desa meningkat sebesar 44,2%.

0,251 (X₂) : Jika setiap penambahan variabel akuntabilitas sebesar satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka pembangunan desa meningkat sebesar 25,1%.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengaruh Tranparansi Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

H_{a1} : Terdapat pengaruh transparansi terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Variabel pendapatan (X_1) berdasarkan nilai t hitung $>$ t tabel ($5.088 > 1.98638$), dan probabilitas kesalahan yang dihitung lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

H_{02} : Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

H_{a2} : Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Variabel akuntabilitas (X_2) berdasarkan nilai t hitung $>$ t tabel ($2.298 > 1.98638$), dan probabilitas kesalahan yang dihitung lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan ($0,024 < 0,05$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Pengaruh Partispasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

H_{03} : Tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kabupaten Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang.

H_{a3} : Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Variabel partisipasi masyarakat (X_3) berdasarkan nilai t hitung $>$ t tabel ($4.391 > 1.98638$), dan probabilitas kesalahan yang dihitung lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya secara parsial variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Uji F (Uji Simultan)

Untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.⁷⁷

Untuk menganalisis hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat nilai F yakni nilai probabilitasnya, berpengaruh signifikan jika nilai probabilitas yang dihitung $< 0,05$ (signifikansi yang ditetapkan).⁷⁸

Tabel 4.15
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	117.250	3	39.083	22.905	.000 ^b
	Residual	155.276	91	1.706		
	Total	272.526	94			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Hasil uji F pada perhitungan yang menggunakan SPSS 20,0 diperoleh F hitung = 22.905 dengan nilai p value = 0.000 (a) $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti ada pengaruh secara simultan keseluruhan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa secara signifikan.

⁷⁷*Ibid.*, h. 239

⁷⁸Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian...*, h. 175.

4.1.12 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Berikut adalah hasil pengamatan R^2 (Square):⁷⁹ Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*.

Tabel 4.16
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.430	.411	1.30626

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data yang di olah dari SPSS 20, 2021

Pada tabel 4.16 menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,411 yang berarti bahwa 41,1% variasi nilai pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Sedangkan sisanya ($100\% - 41,1\% = 58,9\%$) dijelaskan oleh variabel lain.

4.1.13 Hasil Hipotesis

1. Pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,442 atau 44,2% dengan tingkat signifikan $0,000 < \alpha$

⁷⁹ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis), h. 240.

0,05, dengan demikian hipotesis diterima.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,251 atau 25,1% dengan tingkat signifikan $0,024 < \alpha$ 0,05, dengan demikian hipotesis diterima.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,408 atau sebesar 40,8% dengan tingkat signifikan $0,00 < \alpha$ 0,05, dengan demikian hipotesis diterima.

4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan nya penelitian dan uji statistik melalui SPSS, maka dilakukan nya analisis terhadap pembahasan ini mengenai “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang”.

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Pernyataan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Besaran pengaruh transparansi terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebesar 0,442. Nilai signifikan untuk motivasi sebesar $0,000 < \alpha$ 0,05, hasil penelitian menunjukkan hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Transparansi juga merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. artinya, informasi yang berkaitan dengan berkepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil tercapai.

Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Begitupula dengan perangkat Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang berusaha mengoptimalkan dan memberikan informasi kepada masyarakat secara transparansi agar tidak menimbulkan kesalahfahaman yang terjadi di masyarakat, sehingga menyampaikan segala sesuatu informasi secara keterbukaan. Serta diprediksikan pada Desa Tanjung Genteng ini, dimungkinkan 5 tahun kedepan akan mengalami kenaikan atas fakta yang ada. Perangkat Desa

Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang selalu berusaha memberikan yang terbaik dan jujur dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat dan tidak ada hal apapun yang disembunyikan. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Karena hal tersebut sangat berdampak atau berpengaruh nantinya kepada pembangunan desa kedepannya.

Jika dalam hal penyampaian informasi saja sudah tidak transparan, maka masyarakat pun sulit untuk bisa mempercayai pemerintah desa atau perangkat di desa tersebut. Maka hal inilah yang sangat dijaga oleh perangkat Desa Tanjung Genteng agar antara perangkat desa dan masyarakat saling menjaga sifat ketransparansian satu sama lainnya. Sehingga semakin bagus adanya ketransparansian kepada masyarakat akan meningkatnya pembangunan desa secara optimal dan maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putra Adi Kurniawan (2019)⁸⁰ tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Sekecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). Bahwa dari hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi terhadap pembangunan desa atau pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

⁸⁰ Putra Adi Kurniawan, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* (Studi Pada Desa Sekecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo), 2019.

Pernyataan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Besaran pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebesar 0,251. Nilai signifikan untuk motivasi sebesar $0,024 < \alpha 0,05$, hasil penelitian menunjukkan hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala.⁸¹

Dalam hal ini bahwa seorang yang diberi amanah atau jabatan didunia ini harus di pertanggung jawabkan setiap apa yang dilakukan, di pertanggung jawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat dan di pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

Akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

⁸¹Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 46.

Hal ini juga diterapkan oleh perangkat Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang, dimana dalam hal memberikan laporan berupa alokasi dana desa kepada masyarakat bersifat akuntabel, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga semakin baik adanya informasi yang diberikan bersifat akuntabel, maka akan memberikan kontribusi kepada pembangunan desa secara efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Neny Tri Indrianasari (2017)⁸² tentang Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono), Bahwa dari hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap pembangunan desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Pernyataan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Besaran pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebesar 0,408. Nilai signifikan untuk motivasi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$, hasil penelitian menunjukkan hipotesis

⁸² Neny Tri Indrianasari, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono), 2019.

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana, ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Sedangkan definisi kedua, dan berlaku universal adalah bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.⁸³

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan, partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikuti sertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.⁸⁴

Pada Desa Tanjung Genteng Kabupaten Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam hal pembangunan desa. Pentingnya partisipasi masyarakat ini untuk menunjang berjalan nya suatu rencana pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat sangat

⁸³ Jurnal Berkala Ilmiah Refisiensi Volume 15 No.2 – Juni 2015, h.4.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 32

berkontribusi memberikan partisipasi tersebut, baik dalam memberikan kontribusi berupa uang untuk berjalannya suatu proyek yang ada di desa maupun memberikan kontribusi tenaga dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Sehingga semakin tinggi adanya partisipasi masyarakat kepada perangkat desa maka akan meningkatkan pembangunan desa untuk mencapai hasil yang lebih maksimal lagi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rina Susanti Sianipar (2017)⁸⁵ tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Study Kasus Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Berdagai). Bahwa dari hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

⁸⁵ Rina Susanti Sianipar, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa* (Study Kasus Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Berdagai), 2017.

Selain itu dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,411 (41,1%), yang menunjukkan bahwa kontribusi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat menjelaskan variasi nilai variabel pembangunan desa sebesar 41,1% sedangkan sisanya sebesar 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transparansi secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil uji t (uji parsial) didapatkan hasil t_{hitung} sebesar 5.088 dan nilai probabilitas yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil uji t (uji parsial) didapatkan hasil t_{hitung} sebesar 2.298 dan nilai probabilitas yang dihitung $0,024 < 0,05$ berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil uji t (uji parsial) didapatkan hasil t_{hitung} sebesar 4.391 dan nilai

probabilitas yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Selain itu dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi *adjusted R²* sebesar 0,411 (41,1%), yang menunjukkan bahwa kontribusi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat menjelaskan variasi nilai variabel pembangunan desa sebesar 41,1% sedangkan sisanya sebesar 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran:

1. Bagi Pemerintahan atau Perangkat Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan kegiatan pembangunan desa khususnya pada masyarakat nya agar terus tetap dipertahankan dan dapat lebih optimal sehingga akan menciptakan pembangunan desa yang sangat bagus untuk kedepan nya dan seterusnya.
2. Bagi akademik, dengan adanya penelitian yang dilakukan ini baiknya dapat dijadikan referensi dalam kegiatan belajar dan mengajar maupun dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dibidang pembangunan desa yang dipengaruhi oleh faktor internal yang berkenaan tentang transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai permasalahan pada aspek diatas. Tambahkan variabel yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada dengan berbagai aspek-aspek didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Daerah Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2018
- Husaini, Iismawati, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah*, Jurnal ilmu pengetahuan, VOL.3, NO. 1: 25, 2013.
- Indrianasari, Tri Neny, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono*, 2017.
- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol : 8 No : 2 Tahun 2017.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Jurnal Berkala Ilmiah Refisiensi Volume 15 No.2 – Juni 2015, h.4.
- Kurniawan, Putra Adi, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Sekecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo*, 2019.
- Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi Offset, 2012.
- Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Mulawarman, Aji Dedi, *Akuntansi Syariah Tori Konsep Dan Laporan Keuangan* Jakarta. Publishing Company, 2009.
- Nahrudin, Zulfan, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Didesa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kab Barru*, Jurnal Ilmu Pengetahuan VOL. IV, No 2 Oktober 2012
- Nainggolan, Azmi Fatimah, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Desi Serdang*, 2017.
- Nasihatun dan Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan*, 2015.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Nur Fadjrih Asyik, Intan Sengaji, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa, Jurnal ilmu dan riset akuntansi , pemerintahan, VOL. 7, NO. 3:4, 2017.*
- Rahum, Abu, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, VOL. 3, 2015.*
- Renyowijoyo, Uindro, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.*
- Rina Susanti Sianipar, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Study Kasus Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Berdagai), 2017.*
- Santoso, Singgah, *Buku Latihan SPSS Statistic Parametik, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Computindo, 2000.*
- Setiana, Dwi Novindra, *Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 2017.*
- Shuida, Nyoman, *Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tentang Desa, 2014.*
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&G Bandung: Penerbit alfabeta, 2013.*
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2001.*
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Penerbit , PT Rineka Cipta, 1996.*
- Suryabrata, Umandi, *Metodologi Penelitian, Jakarta: Penerbit Raja grafindo Persada, 1998.*
- Ulya, Zikriatul, *Pengaruh Orintasi Pasar, Orientasi Pembelajaran Terhadap Kinerja Pemasaran Melalui Inovasi Produk Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Industri Kecil Pengolahan Pisang Sale Kabupaten Aceh Timur-Aceh, Tesis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatra Utara.*
- Wahyuni, *Peranan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul, 2019.*

Lampiran 1

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Sdr/i
Perangkat Desa
Tanjung Genteng

Perihal: Pemohonan Pengisian Angket

Dengan Hormat,

Sehubung dengan penulisan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang)”. Dengan ini saya memohon kepada Bapak/Ibu diharapkan objektif, artinya diisi apa adanya.

Angket ini bukan tes psikologi dari atasan atau dari manapun yang artinya semua jawaban Bapak/Ibu adalah benar adanya dan tanggung jawab yang dimintai sesuai dengan kondisi yang dirasakan, karena itu data dan identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan dan tidak akan mempengaruhi kegiatan Bapak/Ibu sehari-hari.

Hasil pengisian kuesioner ini akan digunakan secara ilmiah untuk study saya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Langsa dalam prodi studi Prbankan Syariah.

Demikian pengantar ini dibuat atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

(Ari WiBowo)

Petunjuk Pengisian kuisisioner

Dibawah ini ada beberapa kelompok pertanyaan yang seluruhnya berkaitan dengan “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang)”. Oleh karenanya saya sangat mengharapkan agar Bapak/Ibu/Saudara/I dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat dan pandangan yang sebenarnya. Jawaban yang anda berikan tidak memiliki nilai atau makna salah atau benar, tetapi kami hanya inginkan pendapat dan pandangan Bapak/Ibu/saudara/I berhubung dengan pertanyaan yang diberikan.

A. Identitas Responden.

No. Responden

1. Nama : (Boleh tidak diisi)
2. Alamat :
3. Umur : Tahun
4. Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan
5. Status Perkawinan : () Kawin () Belum Kawin
6. Tingkat Pendidikan : () SD () D3
() SMP () S1
() SMA () S2

B. Isilah jawaban berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/saudara/I, dengan cara memberikan tanda *check* (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun Bobot dari jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju	(SS)	= 5
Setuju	(S)	= 4
Ragu-ragu	(RR)	= 3
Kurang setuju	(KS)	= 2
Tidak setuju	(TS)	= 1

Transparansi

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
1.	Penyediaan Informasi					
	Penyediaan dan penyampaian informasi jelas dan sudah dipertanggung jawabkan oleh perangkat desa tanjung genteng					
2.	Menyusun Mekanisme					
	Pengumuman untuk pengaduan atau pengomplinan jika peraturan dilanggar tentang adanya suap menyuap telah dilakukan oleh perangkat desa tanjung genteng.					
3.	Kemudahan akses informasi					
	Adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah dalam peningkatkan informasi yang ada didesa tanjung genteng					

Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
1.	Terbuka dimedia masa					
	Kepala desa tanjung genteng menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada media massa.					
2.	Mudah diakses					
	Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat mudah di akses dimedia massa.					
3.	Ketersediaan informasi					
	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan dan dipublikasikan secara lengkap.					

Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
1.	Keterlibatan masyarakat					
	Masyarakat desa tanjung genteng bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.					
2.	Adanya pengawasan dari masyarakat					
	Masyarakat desa tanjung genteng bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.					
3.	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat					
	Masyarakat desa tanjung genteng bersedia menjaga dan melestarikan hasil dari program yang dilaksanakan oleh desa.					

Pembangunan Desa

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
1.	Sarana perekonomian					
	Tingkat pencapaian program pembangunan desa seperti parit, jalan, pemeliharaan lapangan desa dan meningkatkan ekonomi desa tanjung genteng telah terlaksana.					
2.	Tingkat pendidikan					
	Tingkat pencapaian program pembangunan dan pemeliharaan sekolah (pendidikan) yang ada didesa tanjung genteng telah terlaksana.					
3.	Tingkat kesehatan					
	Tingkat pelaksana program pemberi layanan posyandu ibu hamil, balita dan lansia yang ada didesa tanjung genteng telah terlaksana.					

Lampiran 2**HASIL REGRES ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA (SPSS)****UJI VALIDITAS****Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.222 [*]	.223 [*]	.709 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.030	.030	.000
	N	95	95	95	95
X1.2	Pearson Correlation	.222 [*]	1	.034	.610 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.030		.745	.000
	N	95	95	95	95
X1.3	Pearson Correlation	.223 [*]	.034	1	.669 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.030	.745		.000
	N	95	95	95	95
X1	Pearson Correlation	.709 ^{**}	.610 ^{**}	.669 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.4	X2.5	X2.6	X2
X2.4	Pearson Correlation	1	.181	.385 ^{**}	.740 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.080	.000	.000
	N	95	95	95	95
X2.5	Pearson Correlation	.181	1	.278 ^{**}	.674 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.080		.006	.000
	N	95	95	95	95
X2.6	Pearson Correlation	.385 ^{**}	.278 ^{**}	1	.751 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.000
	N	95	95	95	95
X2	Pearson Correlation	.740 ^{**}	.674 ^{**}	.751 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.7	X3.8	X3.9	X3
X3.7	Pearson Correlation	1	.098	.318**	.676**
	Sig. (2-tailed)		.343	.002	.000
	N	95	95	95	95
X3.8	Pearson Correlation	.098	1	.082	.667**
	Sig. (2-tailed)	.343		.429	.000
	N	95	95	95	95
X3.9	Pearson Correlation	.318**	.082	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.002	.429		.000
	N	95	95	95	95
X3	Pearson Correlation	.676**	.667**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.359**	.104	.680**
	Sig. (2-tailed)		.000	.316	.000
	N	95	95	95	95
Y1.2	Pearson Correlation	.359**	1	.450**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	95	95	95	95
Y1.3	Pearson Correlation	.104	.450**	1	.745**
	Sig. (2-tailed)	.316	.000		.000
	N	95	95	95	95
Y1	Pearson Correlation	.680**	.759**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.786	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	4

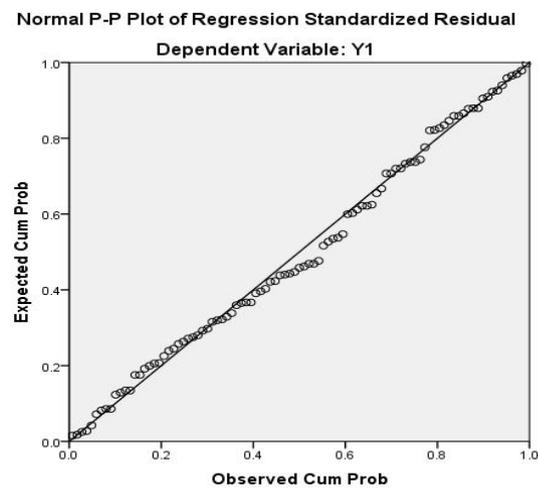
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	4

UJI ASUMSI KLASIK

HASIL UJI NORMALITAS

GAMBAR PP PLOT



HASIL UJI ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST

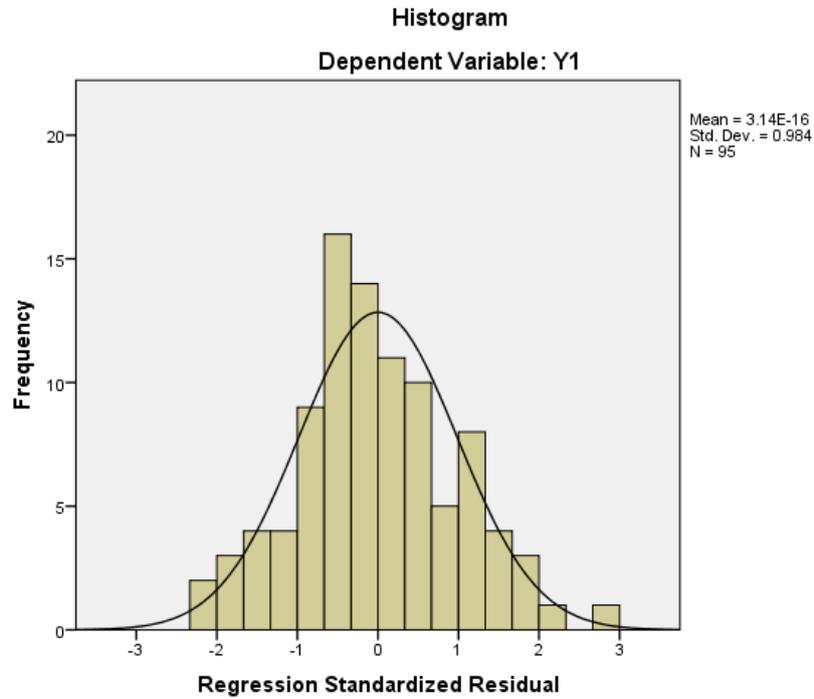
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3	Y1
N		95	95	95	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	11.0526	10.7789	10.0526	10.6842
	Std. Deviation	1.55993	1.32230	1.55993	1.70271
	Absolute	.139	.192	.129	.153
Most Extreme Differences	Positive	.135	.192	.129	.153
	Negative	-.139	-.124	-.128	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		1.356	1.867	1.258	1.489
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050	.002	.085	.024

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

HISTOGRAM



HASIL UJI LINEARITAS

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
		(Combined)	65.031	7	9.290	3.895	.001
Y1 *	Between	Linearity	55.409	1	55.409	23.232	.000
X1	Groups	Deviation from Linearity	9.622	6	1.604	.672	.672
	Within Groups		207.495	87	2.385		
	Total		272.526	94			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y1 *	Between	(Combined)	44.357	6	7.393	2.851	.014

X2	Groups	Linearity	32.751	1	32.751	12.631	.001
		Deviation from Linearity	11.606	5	2.321	.895	.488
	Within Groups		228.170	88	2.593		
	Total		272.526	94			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
		(Combined)	96.645	9	10.738	5.190	.000
	Between	Linearity	63.563	1	63.563	30.719	.000
Y1 *	Groups	Deviation from Linearity	33.082	8	4.135	1.998	.056
X3	Within Groups		175.881	85	2.069		
	Total		272.526	94			

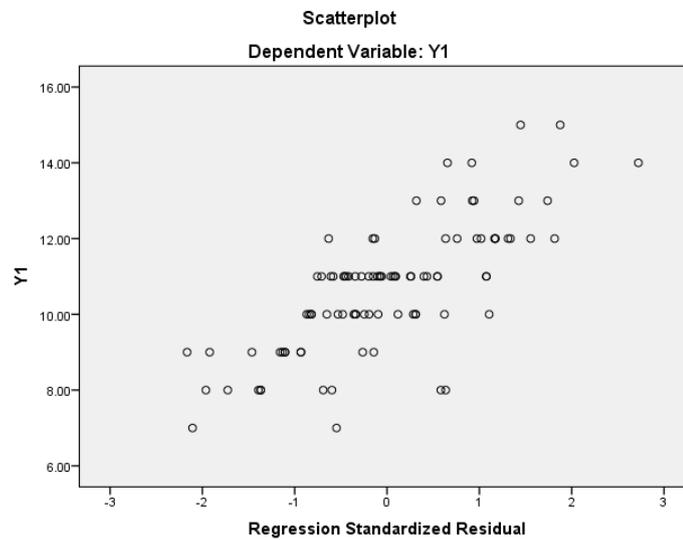
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Toleranc e	VIF
1	(Constan t)	-.995	1.493		-.667	.507		
	X1	.442	.087	.405	5.088	.000	.990	1.010
	X2	.251	.109	.195	2.298	.024	.873	1.146
	X3	.408	.093	.373	4.391	.000	.866	1.155

a. Dependent Variable: Y1

UJI HETEROSKEDASTISITAS



HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 ^a	.430	.411	1.30626	1.985

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y1

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.995	1.493		-.667	.507
	X1	.442	.087	.405	5.088	.000
	X2	.251	.109	.195	2.298	.024
	X3	.408	.093	.373	4.391	.000

a. Dependent Variable: Y1

Lampiran 4















SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 41 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** sebagai Pembimbing I dan **Zikriatul Ulya, SE, M.Si** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Ari Wibowo**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012017005, dengan Judul Skripsi : "**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang)**".
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Tsani 1442 H



Dekan,

Iskandar

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

BIODATA PENULIS

A. Identitas Penulis

Nama : Ari Wibowo
Nim : 4012017005
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Genteng, 10 juni 1998
Alamat : Dusun Alur Selamat, Desa Tanjung Genteng,
Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang
pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah
Anak ke : 4 (empat)
Tahun Masuk ke Fakultas : 2017

B. Riwayat Pendidikan

Tamat SD : SD Negeri Tanjung Genteng
Tamat SMP : SMPN 7 Kejuruan Muda
Tamat SMA : SMAN 4 Kejuruan Muda

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Warsono
Nama Ibu : Alm. Misiah
Alamat : Dusun Alur Selamat, Desa Tanjung Genteng,
Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang

Langsa, 06 April 2022
Penulis

Ari Wibowo
4012017005